

SENIN,
21 September 2026

MESSI GAGAL MENANGKAN INTER MIAMI | HLM 12

M
www.harian-merdeka.com
Rp 15.000,- Terbit Sore

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemenkeu Dimutasi

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (21/9/2026) pagi.

Pelantikan tersebut mencakup sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga pengisian jabatan pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Bersambung ke
Halaman 11

DPR Segera Bentuk Panja RUU Pemilu

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons wacana agar capres minimal harus mendapat 2 dukungan fraksi DPR. Usulan ini mencuat dari pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Dede Yusuf mengatakan, usulan ini akan masuk dalam pembahasan RUU Pemilu. Diharapkan agar ke depan capres di Pemilu tidak hanya 2 calon.

"Kalau komisi mengikuti keputusan MK 0% (presidential threshold) dan mendengar masukan dari civil society agar tidak ada calon yang menumpuk semua partai dalam koalisi," kata Dede kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9).

Bersambung ke
Halaman 11

AKTIVIS GERUDUK KPK, DESAK PERIKSA NUSRON WAHID

JAKARTA |
Harian Merdeka

Gerakan Aktivis Antikorupsi Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, terkait temuan uang sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Tuntutan tersebut disuarakan oleh puluhan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung

Bersambung ke
Halaman 11





Dasco Tambah Dua Mobil Operasional untuk Gerindra Kota Tangerang

TANGERANG | **Harian Merdek**

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan tambahan dua unit mobil operasional kepada DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Banten. Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan organisasi dan konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dasco mengatakan, dua kendaraan operasional itu diperuntukkan bagi daerah pemilihan (dapil) 4 dan dapil 5 Kota Tangerang yang saat ini masih membutuhkan kendaraan untuk mendukung aktivitas kepartaian.

Menurut Dasco, kedua mobil tersebut ditargetkan sudah diterima oleh DPC Gerindra Kota Tangerang pada pekan depan.

“Dua unit mobil yang belum didapat di dapil 5 dan dapil 4, insya Allah minggu depan akan didapat,” kata Dasco saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Gerindra Kota Tangerang di GOR Gondrong, Minggu (20/9).

Dasco juga mengapresiasi proses konsolidasi organisasi Gerindra Kota Tangerang yang dinilainya telah berjalan secara terstruktur. Konsolidasi tersebut, kata dia, dilakukan hingga tingkat ranting.

Ia berharap dukungan sarana operasional tersebut dapat semakin menunjang kerja-kerja organisasi dan memperkuat koordinasi jaringan Gerindra di Kota Tangerang.

Dengan tambahan kendaraan itu, aktivitas pengurus di masing-masing wilayah diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menjalankan agenda organisasi serta komunikasi dengan struktur partai di tingkat kecamatan dan kelurahan. ● (hmi)

Wacana Capres Minimal Didukung 2 Fraksi Disoroti Pengamat



JAKARTA |
Harian Merdek

Merdeka — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai wacana pasangan capres-cawapres minimal didukung dua fraksi layak dipertimbangkan. Sementara Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut mekanisme tersebut dapat menjaga agar jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit.

Namun, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Indonesia, Arifki Chaniago, menilai persoalan utamanya bukan semata-mata apakah syarat dua fraksi tergolong ringan atau berat. Menurutnya, yang lebih penting adalah melihat dampak aturan tersebut terhadap jumlah kandidat yang dapat mengikuti Pilpres 2029.

“Presidential threshold sudah dihapus. Jangan sampai setelah itu muncul mekanisme baru yang secara politik justru kembali

mengurangi jumlah kontender Pilpres 2029,” kata Arifki.

Menurut Arifki, syarat dukungan minimal dua fraksi memang secara teknis berbeda dengan presidential threshold yang sebelumnya berlaku. Namun, perbedaan bentuk aturan tidak otomatis berarti dampaknya terhadap kompetisi juga berbeda.

“Jangan hanya melihat apakah bentuk aturannya berbeda. Yang perlu dilihat adalah efek akhirnya. Kalau semakin sedikit figur yang mampu mendapatkan tiket pencalonan, maka secara politik kita tetap sedang membatasi jumlah pemain yang bisa masuk,” ujarnya.

Arifki menilai isu tersebut akan relevan bagi sejumlah figur yang mulai diperbincangkan menuju Pilpres 2029, seperti Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, dan Dedi Mulyadi, yang memiliki popularitas dan basis dukungan publik, tetapi tetap membutuhkan dukungan partai politik un-

tuk memenuhi mekanisme pencalonan. Hal serupa juga berlaku bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jika mekanisme dukungan minimal dua fraksi diberlakukan, Demokrat perlu membangun kerja sama politik dengan partai lain apabila ingin mengusung pasangan calon sendiri.

“Nama-nama seperti Gibran, Anies, AHY maupun Dedi Mulyadi bisa saja masuk dalam pembicaraan politik menuju 2029. Tetapi persoalannya bukan hanya soal popularitas atau elektabilitas. Tetapi siapa yang memiliki akses terhadap tiket pencalonan ketika aturan ini benar-benar diberlakukan,” kata Arifki.

Ia mengatakan, figur yang memiliki dukungan publik tetap membutuhkan kendaraan politik atau dukungan partai sesuai dengan mekanisme pencalonan yang nantinya disepakati.

“Figur bisa punya popularitas dan dukungan publik, tetapi kalau tidak memenuhi syarat pencalonan, tetap saja tidak bisa bertanding. Jadi kita perlu membedakan antara punya basis dukungan publik dengan punya tiket pencalonan,” ujarnya.

Menurut Arifki, hal tersebut penting karena pemilu presiden pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang dipilih rakyat, tetapi juga siapa saja yang tersedia untuk dipilih rakyat.

“Rakyat memang memilih presiden secara langsung. Tetapi sebelum rakyat menentukan pilihan, ada proses yang menentukan siapa saja yang boleh masuk ke surat suara. Jangan sampai jumlah kontender sudah berkurang sebelum rakyat memberikan suara,” katanya. ● (Agus)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiromo Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Pencopotan Dirjen Hubla di Tengah Rentetan Kecelakaan Kapal



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud. Pergantian tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal dan penyegaran organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Posisi Dirjen Hubla untuk sementara dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP)

Kemenhub Farida Makhmudah mengatakan pergantian tersebut merupakan langkah manajerial untuk memperkuat pelaksanaan tugas Ditjen Hubla.

“Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya,” kata Farida, Jumat (18/9/2026).

Bagian dari Evaluasi Internal
Menhub Dudy Purwagandhi sebelumnya menjelaskan bahwa penggantian Dirjen Hubla merupakan bagian dari evaluasi internal Kemenhub.

“Pergantian dirjen ke Plt saat ini Sesditjen sebagai bagian dari evaluasi kita di internal,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Jumat (18/9/2026).

Kemenhub menyebut evaluasi

tersebut diarahkan untuk memperkuat kepemimpinan dan sistem pengawasan di sektor transportasi laut.

Farida menegaskan pergantian pimpinan di lingkungan Ditjen Hubla merupakan bagian dari penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, khususnya di bidang keselamatan dan pengawasan pelayaran.

Keselamatan Pelayaran Jadi Sorotan

Kemenhub menyatakan keselamatan pelayaran menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi tersebut.

Menurut Farida, pembenahan tidak hanya menyangkut regulasi dan administrasi, tetapi juga harus mencakup pengawasan langsung di lapangan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kepatuhan terhadap standar keselamatan, kelaiklautan kapal, pengawasan terhadap muatan dan penumpang, serta pelaksanaan prosedur sebelum kapal berlayar.

“Keselamatan adalah prioritas utama. Karena itu, Kemenhub

dan seluruh stakeholder perlu terus melakukan pembenahan,” ujar Farida. Kemenhub juga ingin memastikan seluruh jajaran Ditjen Hubla memiliki fokus dan kecepatan yang sama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.

Lollan Panjaitan Ditunjuk sebagai Plt

Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Kemenhub menunjuk Lollan Panjaitan yang sebelumnya menjabat Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut sebagai Plt Dirjen Hubla.

Penunjukan pejabat pelaksana tugas tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan pelayanan sektor transportasi laut tidak terganggu selama proses penataan kepemimpinan berlangsung.

Lollan kini bertanggung jawab menjalankan fungsi strategis Ditjen Hubla, termasuk memastikan pengawasan dan pelayanan transportasi laut tetap berjalan.

Bukan Hanya Dirjen Hubla yang Berganti

Pergantian di lingkungan Kemenhub pada Jumat (18/9/2026) tidak hanya terjadi pada posisi Dirjen Hubla.

Kemenhub juga menunjuk Plt Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Namun, Farida menjelaskan pergantian di BPSDMP terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. ● (Agus)

Hoaks! Purbaya Disebut Jadi Ketua Bea Cukai, Komdigi: Itu Foto Lama

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Informasi yang menyebut mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk menjadi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dipastikan hoaks.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman resmi cek fakta hoaks mengklarifikasi informasi tersebut pada 19 September 2026.

Informasi yang beredar di media sosial, khususnya Facebook, disertai

foto Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan klaim bahwa Purbaya mendapatkan jabatan baru sebagai pimpinan Bea dan Cukai setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Namun, Komdigi menyatakan tidak menemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Foto Purbaya Ternyata Dokumentasi Lama

Hasil penelusuran menunjukkan foto yang

digunakan dalam unggahan tersebut bukan dokumentasi pengangkatan Purbaya sebagai pejabat baru di lingkungan Bea Cukai.

Foto itu identik dengan unggahan akun Instagram

@bckanwilkalbagtim pada 13 Oktober 2025.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Purbaya diketahui mengenakan pakaian dinas upacara DJBC karena saat itu dirinya hadir sebagai pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai.

Dengan demikian, penggunaan foto lama



tersebut untuk mendukung klaim bahwa Purbaya telah ditunjuk sebagai pimpinan Bea Cukai dinilai menyesatkan.

Siapa Dirjen Bea Cukai Saat Ini?

Komdigi juga merujuk informasi resmi

Kementerian Keuangan mengenai pejabat yang menduduki posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan profil pejabat Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai masih diemban Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama, yang dilantik pada 23 Mei 2025.

Artinya, tidak terdapat dasar resmi untuk menyebut Purbaya Yudhi Sadewa telah ditunjuk menggantikan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. ● (Agus)



Barang Bukti Dilimpahkan, Febrie Adriansyah Siap Uji Semua Tuduhan di Pengadilan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memasuki babak baru.

Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, serta tersangka Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) atau tahap II pada Jumat, 18 September 2026.

Langkah tersebut disambut positif tim kuasa hukum Febrie.

Pengacara Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya siap menghadapi proses persidangan yang akan menjadi ruang untuk menguji seluruh tuduhan dan alat bukti dalam perkara tersebut.

"Beliau (Febrie Adriansyah) tentu saja termasuk dengan tim advokat menyambut baik proses pelimpahan ini," kata Febri kepada wartawan. Menurut Febri, pelimpahan tahap II menjadi babak penting karena perkara selanjutnya akan memasuki persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Di persidangan, kata dia, pihaknya akan menguji secara terbuka berbagai klaim, bukti, hingga dugaan yang selama ini dialamatkan kepada kliennya.

"Bagi kami ini adalah babak baru, tahapan baru yang penting sekali. Karena di tahapan berikutnya kita mulai akan menguji setiap detail klaim, setiap detail bukti, setiap detail tuduhan-tuduhan, setiap detail dugaan-dugaan yang disangkakan pada Pak FA sebelumnya," ujar Febrie.

Minta Persidangan Berjalan Objektif

Febri menilai proses persidangan secara terbuka menjadi momentum untuk mengetahui fakta perkara secara lebih utuh.

Menurutnya, pengujian terhadap alat bukti dan tuduhan harus dilakukan secara objektif sehingga dapat diketahui fakta mana yang dapat dibuktikan dan mana yang tidak.

"Melalui proses pengujian yang terbuka dan objektiflah kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar," katanya.

Tim kuasa hukum Febrie juga berharap proses hukum pada tahap persidangan berlangsung secara objektif dan adil. ● (Agus)

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Masuk MK, LAPD Soroti Batas Kewenangan Konstitusi

JAKARTA |
Harian Merdeka

Gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 kini menjadi perhatian Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD).

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan siaran pers LAPD, permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 September 2026.

LAPD menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut persoalan dokumen atau pemenuhan syarat pendidikan seorang calon wakil presiden.

Menurut lembaga tersebut, ada persoalan yang lebih mendasar, yakni mengenai batas kewenangan MK dalam memeriksa persoalan Pemilu yang muncul setelah hasil Pemilu 2024 ditetapkan.

Direktur Eksekutif LAPD Kaka Suminta mengatakan, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah apakah persoalan mengenai syarat calon yang muncul setelah Pemilu 2024 masih dapat diperiksa melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 2026.

"Yang diuji bukan hanya perkara, tetapi juga batas kewenangan MK," demikian pokok sikap LAPD dalam siaran persnya, Minggu (20/9/2026).

PMK 1/2026 Dinilai Bukan Otomatis Perluasan Wewenang

LAPD menyoroti terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tahapan dan jadwal penanganan

permohonan PHPU Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.



LAPD memandang aturan tersebut sebagai pintu prosedural yang memungkinkan perkara diajukan dan diperiksa secara administratif serta prosedural.

Namun, menurut LAPD, keberadaan aturan prosedur tersebut tidak serta-merta memperluas kewenangan substantif MK.

Dengan kata lain, dibukanya mekanisme pengajuan perkara tidak otomatis membuat seluruh persoalan yang diajukan menjadi objek yang dapat diputus MK.

"PMK ini merupakan procedural opener, membuka tata cara agar perkara dapat diajukan dan diperiksa secara prosedural. Namun, dibukanya pintu prosedur tidak otomatis berarti semua persoalan di balik pintu itu menjadi kewenangan MK," demikian pandangan LAPD.

MK Diminta Tegaskan Objek Sengketa

LAPD menilai perkara tersebut dapat menjadi batu uji terhadap yurisdiksi MK.

Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang menurut LAPD perlu dijelaskan dalam pemeriksaan perkara.

Pertama, apa sebenarnya objek sengketa yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Kedua, apakah persoalan mengenai syarat calon dapat diperiksa melalui mekanisme PHPU setelah hasil Pemilu ditetapkan.

Ketiga, bagaimana hubungan antara dugaan cacat syarat calon dengan hasil Pemilu 2024.

Keempat, apakah PMK dapat menjadi dasar untuk membuka kembali perkara Pemilu yang sebelumnya telah selesai.

Kelima, di mana batas kewenangan MK dengan lembaga lain seperti KPU, Bawaslu, DKPP, peradilan administrasi, maupun mekanisme hukum lainnya.

Selain itu, apabila ditemukan adanya pelanggaran, forum hukum mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksanya juga menjadi pertanyaan penting.

Begitu pula dengan persoalan remedinya. Jika MK dinilai berwenang memeriksa perkara tersebut, perlu dijelaskan sampai sejauh mana akibat hukum atau remedinya dapat diberikan.

Pemohon Minta Diskualifikasi Gibran

Dalam perkara tersebut, para pemohon mendalilkan bahwa persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran belum pernah diperiksa secara khusus melalui PHPU Pemilu 2024.

Para pemohon juga meminta sejumlah konsekuensi hukum, antara lain diskualifikasi Gibran serta pembatalan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pencalonan dan hasil Pemilu. ● (Agus)

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dolar Singapura Rp.4,7 M



TANGERANG SELATAN |
Harian Merdeka

Polres Tangerang Selatan meningkatkan penanganan kasus dugaan pemalsuan dan peredaran uang dolar Singapura senilai 340.000 dolar Singapura (SGD), atau sekitar Rp4,7 miliar, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menggelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Kasi Humas Polres Tangerang Selatan Iptu Yuni mengatakan peningkatan status dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

“Penyidik telah melakukan kegiatan sesuai dengan me-

kanisme gelar perkara dan hasil gelar perkara status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan,” kata Yuni, Rabu (16/9/2026).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dan peredaran 34 lembar uang pecahan 10.000 dolar Singapura, dengan total nilai mencapai 340.000 SGD.

Kasus ini bermula dari laporan seorang warga berinisial DM kepada Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut tercantum pihak berinisial HJ, EAK, dan AN. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Polres Tangerang Selatan.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo sebelumnya menyatakan penyidik telah meminta keterangan dari enam saksi. Polisi juga

masih memeriksa pihak lain yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut.

Polisi Telusuri Kaitan dengan Singapura

Perkara ini memiliki dimensi lintas negara. Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk memperoleh informasi dari Kepolisian Singapura.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan informasi mengenai seorang WNI yang berada di Singapura dan disebut terkait dengan perkara dugaan pemalsuan serta peredaran uang tersebut.

Polisi masih menunggu jawaban resmi dari otoritas Singapura mengenai status investigasi terhadap WNI tersebut.

● (Agus)

Polda Metro Ungkap Mafia Tanah PTSL Bogor

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Polda Metro Jaya masih mendalami dugaan praktik mafia tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menegaskan perkara tersebut berbeda dan tidak berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor pertanahan Bogor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengeledahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara PTSL 2019.

“Pengeledahan kantor BPN di Bogor tidak ada kaitan, berbeda perkara dengan tindakan yang dilakukan oleh KPK,” kata Budi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Pengeledahan sebelumnya dilakukan penyidik Subdit Harta dan Benda (Harda) Ditreskrim Polda Metro Jaya pada Rabu, 9 September 2026.

Polisi menyasar tiga lokasi,

yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I serta dua lokasi lainnya di wilayah Cibinong dan Bojonggede.

Dari pengeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang dianggap berkaitan dengan perkara, antara lain dokumen pertanahan, perangkat elektronik, printer, dan mesin ketik.

Polisi Temukan Dugaan Pemalsuan Dokumen

Perkara ini telah masuk tahap penyidikan sejak Desember 2025. Polisi menyebut telah memeriksa hampir 50 orang untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL di Bojonggede.

Program PTSL di Kecamatan Bojonggede pada 2019 mencakup sekitar 10 ribu sertifikat tanah. Namun, penyidik saat ini memfokuskan pendalaman terhadap 52 sertifikat.

Polisi menduga pemalsuan terjadi pada tahap pendaftaran, verifikasi, dan proses yudikasi, bukan semata-mata pada sertifikat yang telah diterbitkan. Sejumlah produk PTSL yang bermasalah bahkan disebut telah dibatalkan.



Penyidik juga menemukan dugaan praktik curang yang berpotensi menyebabkan sertifikat ganda maupun tumpang-tindih kepemilikan.

Dalam perkara tersebut, polisi menyebut dugaan keterlibatan tidak hanya berasal dari satu unsur. Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan oknum dalam tim yudikasi, panitia PTSL, kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga oknum internal BPN.

Pejabat ATR/BPN Turut Diperiksa

Pendalaman perkara juga telah menyentuh pejabat

Kementerian ATR/BPN. Polda Metro Jaya sebelumnya memeriksa Agustyarsyah, yang pada 2019 pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Bogor I dan kini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan disebut berlangsung sekitar 15 jam.

Polisi juga mendalami dugaan manipulasi dokumen dalam proses pendaftaran tanah. Salah satu laporan yang telah diberikan menyebut adanya dugaan penggunaan cairan pemutih untuk memanipulasi dokumen serta hilangnya dokumen asli tanah warga. Namun, detail dan pertanggungjawaban pidana atas dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Dua Perkara Pertanahan Berjalan Terpisah

Penegasan Polda Metro Jaya mengenai perbedaan perkara menjadi penting karena pengeledahan BPN Bogor oleh polisi sebelumnya berdekatan waktunya dengan langkah penindakan KPK di lingkungan pertanahan Bogor. ● (Agus)

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Indonesia tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan Koridor Kalimantan dalam skema ASEAN Customs Transit System (ACTS) yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menekankan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelaksanaan Koridor Kalimantan ACTS dapat berjalan efektif.

Menurut Roro, persiapan tidak hanya mencakup pembangunan dan ketersediaan infrastruktur pendukung, tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan dari aspek hukum dan prosedural.

"Terkait hal ini, kami ingin menekankan pentingnya memastikan tersedianya infrastruktur yang diperlukan, serta kesiapan aspek hukum dan prosedural, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koridor Kalimantan ACTS," kata Roro dalam Pertemuan ke-40 Dewan AFTA di Manila, Filipina, sebagaimana

Wamendag: Indonesia Siap Sambut Koridor Kalimantan ACTS 2027



keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (21/9).

Roro mengatakan pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesiapan nasional sebelum koridor tersebut mulai diimplementasikan. Ketersediaan infrastruktur dinilai menjadi

bagian penting agar sistem transit perdagangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempersiapkan kerangka hukum dan prosedur yang dibutuhkan. Kesiapan pada kedua aspek tersebut di-

harapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Koridor Kalimantan ACTS ketika mulai diterapkan pada 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan Roro saat menghadiri Pertemuan ke-40 Dewan AFTA pada Sabtu (19/9/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah perkembangan terkait perdagangan barang intra-ASEAN, termasuk upaya memperkuat implementasi berbagai agenda perdagangan di kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Roro bersama para Menteri Ekonomi ASEAN turut mendorong badan-badan sektoral yang berada di bawah koordinasi Dewan AFTA untuk menjalankan rencana aksi Strategic Action Plan Trade in Goods (TIG-SAP) 2026-2030 sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

● (zim/hmi)

Pemerintah Dorong Teknologi Industri 4.0 untuk Perkuat Penanggulangan Bencana

JAKARTA |
Harian Merdeka

Perkembangan teknologi industri 4.0 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor manufaktur, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari upaya pencegahan dan mitigasi, penanganan saat bencana terjadi, hingga proses pemulihan pascabencana.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan percepatan transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.



kat. Menurutnya, transformasi digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan dalam mengadopsi teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

"Komponen terpenting pada proses transformasi digital berupa kesadaran manfaat penggunaan peralatan digital, tidak hanya sekadar kemampuan adopsi teknologi, namun harus sejalan dengan perubahan mindset digital," ujar Agus dalam keterangannya yang dikonfirmasi

di Jakarta, Senin (21/9).

Dalam mempercepat transformasi digital sektor manufaktur, Kemenperin menjadikan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) sebagai technology and digital hub bagi sektor manufaktur nasional.

Hingga saat ini, PIDI 4.0 telah membangun kolaborasi dengan sedikitnya 65 mitra. Mitra tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari pelaku industri, penyedia teknologi, asosiasi, hingga perguruan tinggi.

Ekosistem tersebut dinilai memiliki potensi untuk melahirkan berbagai inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bidang yang mulai mendapat perhatian adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pelaksana Tugas Kepala

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan PIDI 4.0 turut membangun kemitraan dengan perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi untuk kebutuhan kebencanaan.

"Terkait dengan bidang penanggulangan bencana, PIDI 4.0 Kementerian Perindustrian memiliki kemitraan dengan dua startup, yaitu TechnoGIS dari Sleman, Yogyakarta dan BATARI Energy dari Cimahi, Jawa Barat. Kedua perusahaan tersebut telah melahirkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia," ujar Adie.

Kedua startup tersebut kemudian dihadirkan Kemenperin dalam Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO)

2026 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 9-12 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peluang kerja sama business-to-business (B2B), sekaligus memperkenalkan kemampuan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.

Teknologi Geospasial hingga Energi Darurat

Salah satu teknologi yang diperkenalkan berasal dari TechnoGIS. Perusahaan rintisan asal Sleman, Yogyakarta, tersebut mengembangkan teknologi geospasial yang dapat digunakan untuk membantu pemetaan wilayah terdampak bencana. ● (zim/hmi)

DPR dan Pemerintah Bahas 596 Masalah Agraria



JAKARTA |
Harian Merdeka

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria memasuki tahap penting. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat kerja untuk mengam-bil keputusan Tingkat I terhadap RUU tersebut di kom-pleks parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah perwakilan pemer-intah, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Nusron Wahid.

“Rapat kerja Badan Legislasi pada hari ini dilak-sanakan dalam rangka pen-gambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU ten-tang Pengaturan Reforma Agraria,” kata Dasco saat membuka rapat.

Rapat tersebut digelar setelah Panitia Kerja (Panja) Baleg menyelesaikan pem-bahasan RUU pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Dalam agenda keputusan Tingkat I, masing-masing fraksi DPR menyam-paikan pandangan mini fraksi sebelum proses pengambilan keputusan dilanjutkan.

Dasco mengatakan rapat akan berlangsung hingga seluruh agenda selesai. Namun, apabila masih ter-dapat persoalan yang mem-butuhkan pembahasan lebih lanjut, rapat dapat diakh-iri lebih awal berdasarkan kesepakatan bersama.

“Rapat hari ini akan berlang-sung sampai dengan selesai, namun apabila ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, rapat dapat diakhiri sebelum waktunya sesuai kes-epakatan rapat,” ujar Dasco.

596 DIM dari Pemerintah
Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan rancangan regulasi terse-but telah dilakukan secara intensif melalui rapat Panja pada 17–21 September 2026.

RUU Pengaturan Reforma Agraria merupakan usul inisiatif DPR RI. Karena itu, pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pemba-hasan bersama Baleg.

“Adapun jumlah DIM yang disampaikan oleh pemerin-tah sebanyak 596 DIM,” kata Iman Sukri.

Dari jumlah tersebut, hasil pembahasan meng-hasilkan sejumlah kat-egori. Sebanyak 164 DIM dinyatakan tetap, 54 DIM mengalami perubahan reda-ksi, dan 57 DIM mengalami perubahan substansi.

Selain itu, sebanyak 295 DIM dihapus, tiga DIM

mendapat penambahan substansi, 20 DIM berupa penambahan pasal, ayat atau huruf, serta tiga DIM mengalami reposisi sekal-igus perubahan substansi atau redaksi.

Menurut Iman Sukri, kom-posisi hasil pembahasan tersebut menunjukkan ad-any perhatian yang serius dari pemerintah dan DPR terhadap agenda reforma agraria, khususnya dalam upaya menyelesaikan kon-flik agraria.

“Komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemer-intah juga memiliki pandan-gan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius ter-hadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria,” ujarnya.

RUU Diarahkan untuk Penyelesaian Konflik Agraria

RUU Pengaturan Reforma Agraria sebelumnya telah dis-etujui menjadi RUU usul DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026. Dalam proses pembahasannya, Baleg menempatkan penyelesaian konflik agraria sebagai salah satu perhatian utama.

Pembahasan RUU tersebut juga mencakup berbagai aspek reforma agraria, termasuk persoalan objek tanah dan mekanisme pe-nyelesaian konflik. Baleg sebelumnya menyebut ran-cangan regulasi ini diharap-kan dapat menjadi payung hukum untuk menangani persoalan agraria yang be-lum terselesaikan melalui berbagai aturan sektoral.

Setelah pembahasan Panja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi diselesaikan, rapat kerja pada Senin men-jadi tahapan untuk men-gambil keputusan Tingkat I. Selanjutnya, proses legislasi akan mengikuti tahapan pembahasan sesuai me-kanisme pembentukan und-dang-undang. ● (zim/hmi)



DPR Desak KKP Kendalikan Harga Ikan, Nelayan Jangan Terus Jadi Korban Fluktuasi Pasar

BANDUNG | **Harian Merdeka**

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merumuskan regulasi untuk mengendalikan harga hasil tangkapan nelayan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah nelayan di desa-desa maritim terus mengalami keru-gian akibat harga ikan yang berfluktuasi.

Ellen menilai pemerintah perlu meny-iaapkan instrumen perlindungan harga bagi nelayan, sebagaimana terdapat skema harga acuan pada sektor pertanian.

Menurutnya, ketidakpastian harga jual ikan menjadi salah satu persoalan yang langsung memengaruhi pendapatan ke-lompok nelayan.

“Jika di Kementerian Pertanian ada instru-men Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga acuan gabah, maka ini menjadi PR bagi KKP. Memang mengatur hasil perikanan laut tidak mudah, tetapi kalau kita punya komitmen kuat melindungi nelayan, KKP harus bisa mengendalikan harga agar nelayan di desa tidak terus-menerus rugi,” ujar Ellen di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu mengatakan persoalan harga tidak semata-mata berkaitan dengan me-kanisme jual beli, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan dapat menghadapi kondisi ketika biaya operasional, bahan bakar, kebutuhan melaut hingga biaya distribusi meningkat, sementara harga hasil tangkapan justru ti-dak memberikan kepastian keuntungan.

Karena itu, menurut Ellen, diperlukan ke-bijakan yang mampu memberikan perlin-dungan tanpa mengabaikan mekanisme pasar dan karakteristik komoditas perikanan.

Selain persoalan harga, Ellen menyoro-ti potensi besar Kabupaten Badung untuk menjadi pusat pengembangan usaha mik-ro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis hasil perikanan. Kekuatan sektor pariwisa-ta di Bali, khususnya Badung, dinilai mem-buka pasar yang sangat besar bagi produk olahan hasil laut. Jutaan wisatawan yang datang setiap tahun dapat menjadi kon-sumen potensial bagi produk perikanan lokal apabila rantai produksi dan pemasa-rannya diperkuat. ● (Agus)

Jennifer Coppen Takut Tinggalkan Kamari

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Selebgram Jennifer Coppen mengungkapkan ketakutan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Ia mengaku luka masa lalu saat ditinggal ibunda meninggal masih membekas hingga saat ini.

Jennifer Coppen menyadari takdir dan batas umur seseorang sepenuhnya berada di tangan Sang Pencipta. Meskipun begitu, ia sangat berharap diberi umur panjang untuk terus mendampingi tumbuh kembang putri semata wayangnya, Kamari Sky Wassink.

“Salah satu ketakutan terbesar aku adalah meninggalkan anak aku, ya. Kayak umur kan udah diatur sama Tuhan, kayak ya udah kapan pun wak-

tunya aku udah dipanggil, aku insyaallah siap gitu ya. Siapa gak siap,” kata Jennifer Coppen saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).

Istri pesepakbola Justin Hubner itu merasakan betapa pedihnya tumbuh dewasa tanpa kehadiran figur ibu di sisinya. Ibunda Jennifer, almarhumah Hotimah Imaniar, mengembuskan napas terakhir pada 2017 usai berjuang melawan penyakit kanker serviks.

Rasa kehilangan tersebut sempat membuatnya terpukul saat harus menjalani fase baru kehidupannya. Ia merasa gamang ketika pertama kali melahirkan dan merawat anak. Sebab ia terpaksa mempelajari se-

luruh peran sebagai orang tua secara otodidak tanpa ada bimbingan ibu kandung.

“Jangan sampai Kamari tuh merasakan juga karena ya rasanya sangat tidak enak ya. Tumbuh tanpa seorang ibu, udah gitu menjadi seorang ibu tanpa ibu tuh kayak siapa sih yang ngajarin gue, bingung gitu. Serba belajar sendiri menjadi seorang ibu,” tuturnya.

Trauma masa lalu itu memunculkan tekad kuat dalam diri Jennifer Coppen agar Kamari tidak merasakan hal

serupa. Ia terus memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan dan raga yang prima demi menjaga buah hatinya.

“Jadi ya aku selalu berdoa semoga aku tuh sehat terus,” ucapnya.

Kekhawatiran itu pada akhirnya mendorong Jennifer untuk menerapkan disiplin gaya hidup sehat. Perempuan berusia 25 tahun itu rutin berolahraga dan sangat menjaga asupan makanannya.

“Makanya itu kita makan juga dijaga, berusaha untuk selalu olahraga, ngejaga tubuh juga supaya umurnya lebih panjang, supaya gak gampang sakit karena anak butuh kita gitu,” pungkasnya.

● (dth)





Pendidikan Inklusif Jangan Sekadar Nama, DPR Soroti Hak Anak Disabilitas

JAKARTA | **Harian Merdek**

Pendidikan inklusif dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas. Sekolah yang berstatus inklusi masih menghadapi persoalan layanan, sarana dan prasarana, hingga ketersediaan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menegaskan, pendidikan inklusif tidak boleh berhenti sebagai nomenklatur atau sekadar status administratif sekolah.

Menurutnya, keberadaan sekolah inklusi harus dibarengi dengan layanan pendidikan yang benar-benar mampu mengakomodasi hak dan kebutuhan setiap anak.

Purnamasidi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rangka menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Purnamasidi, persoalan pendidikan inklusif salah satunya terletak pada pola penyediaan layanan yang masih mempertimbangkan jumlah peserta didik penyandang disabilitas di sebuah sekolah.

Artinya, layanan tertentu cenderung baru disediakan ketika jumlah anak penyandang disabilitas di sekolah tersebut dianggap telah memenuhi kebutuhan atau persyaratan tertentu.

"Sekolah inklusi itu kan nama tanpa fakta. Jadi kita ini masih melihat jumlah berapa anak-anak kita yang disabilitas di sekolah itu. Baru kemudian kita layan," ujar Purnamasidi. Hak Anak Jangan Bergantung Jumlah

Purnamasidi menilai pendekatan berbasis jumlah tersebut berpotensi membuat pelaksanaan pendidikan inklusif tidak berjalan optimal. Sebab, kebutuhan setiap anak penyandang disabilitas tidak selalu sama. Kebutuhan terhadap pendampingan, metode pembelajaran, aksesibilitas, maupun sarana pendukung dapat berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. ● (Agus)

Prabowo Bakal Bangun Ribuan Kapal Nelayan, APKLI Dukung

JAKARTA |
Harian Merdeka

Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia yang mencapai lebih dari 100 ribu kilometer, di mana 70% wilayahnya terdiri dari perairan dan laut dengan kekayaan sumber daya maritim terkaya di dunia. Sebanyak 160 juta penduduk negeri ini tinggal di pesisir pantai dan tersebar di 12.968 desa, atau mencakup 15,39% dari total wilayah administratif setingkat desa, dengan jumlah nelayan mencapai 2,2 hingga 2,6 juta jiwa.

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat sebuah ironi di mana mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih hidup di bawah garis kesejahteraan. Faktor penyebabnya sangat kompleks; mulai dari ratusan triliun rupiah kekayaan laut yang setiap tahunnya dicuri oleh kapal asing, hingga posisi nelayan yang kerap dijadikan buruh dan berada dalam cengkaman pemilik modal besar, baik domestik maupun asing.

Lebih dari itu, selama 81 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara dinilai belum memberikan perhatian yang serius terhadap kedaulatan maritim dan kesejahteraan mereka.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mengungkapkan bahwa dirinya merupakan saksi sejarah yang telah berkeliling ke seluruh penjuru Indonesia.

"Saat di Pelabuhan Bengkulu, Sumatra, dengan kasat mata saya menyaksikan para nelayan hanya jadi objek dan kehidupannya ditinggalkan oleh para pemilik modal kapal sebagai buruh, hidupnya tidak sejahtera,"



ujar Ali Mahsun di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Oleh karena itu, APKLI Merah Putih menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal penuh langkah nyata Presiden Prabowo Subiyanto yang berencana membangun ribuan kapal nelayan (1.582 unit) pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan maritim sekaligus mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Dorong Negara Berikan "Kail" Berupa Regulasi dan Pendampingan

Menurut Ali Mahsun, kehadiran ribuan kapal nelayan tepatnya 1.582 unit pada tahun 2027 akan sangat ideal jika merupakan Bantuan Presiden RI. Kendati demikian, ia menilai negara juga perlu memberikan "kail" berupa regulasi, pendampingan, fasilitas usaha produktif, hingga promosi dan pemasaran. Hal itu dapat disalurkan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Nelayan, maupun Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir.

"Yang lebih mendasar adalah nelayan wajib menjadi subjek, bukan objek ekonomi. Oleh karena itu, pendampingan nelayan menjadi key success dalam memperbaiki kultur dan perilaku, serta mendongkrak spirit para nelayan untuk maju

menjadi pengusaha yang profesional, naik kelas, dan hidupnya lebih sejahtera," tegas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini.

Sebagai solusi konkret pembiayaan, APKLI Merah Putih mendorong pengadaan kebutuhan kapal modern bagi nelayan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat pagu KUR tahun 2026 mencapai Rp300 triliun. APKLI Merah Putih berharap Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI untuk mengalokasikan khusus pagu KUR tahun 2027 sebesar Rp50 triliun untuk pengadaan kapal modern nelayan, dengan simulasi rincian sebagai berikut:

1.000 unit kapal 30 GT (estimasi harga Rp7 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp7 triliun.

400 unit kapal 100 GT (estimasi harga Rp25 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp10 triliun.

400 unit kapal 150 GT (estimasi harga Rp39 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp15,6 triliun. 200 unit kapal 200 GT (estimasi harga Rp45 Miliar) membutuhkan KUR sebesar Rp9 triliun. Sisa pagu KUR dialokasikan untuk rantai pasok (supply chain) ekosistem perekonomian nelayan Indonesia.

"Sekali lagi, kunci suksesnya adalah pendampingan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah tidak bekerja sendirian," imbuhnya. ● (Egi)

PANDEGLANG |
Harian Merdeka

Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal Provinsi Banten. Selanjutnya, Perubahan KUA dan PPAS 2026 menjadi dasar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

Andra Soni mengatakan, setelah kesepakatan ditandatangani, Pemprov Banten bersama DPRD memiliki tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, terutama dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

“Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mengawal pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,” kata Andra Soni, dikutip

Anggaran Banten Turun, Surplus Naik



Wartawan, Minggu (20/9/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penting yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Catatan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara yang telah disampaikan dapat kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,” katanya.

Dalam kesepakatan Perubahan

KUA dan PPAS 2026, pendapatan daerah Provinsi Banten berubah dari semula Rp10,08 triliun lebih menjadi Rp9,72 triliun lebih.

Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp363,91 miliar lebih.

Sementara itu, belanja daerah berubah dari semula Rp10,04 triliun lebih menjadi Rp9,62 triliun lebih atau berkurang sekitar Rp414,74 miliar lebih.

Dengan perubahan tersebut, surplus daerah meningkat dari semula Rp42,95 miliar lebih menjadi Rp93,79 miliar lebih. Surplus tersebut digunakan

untuk menutup pembiayaan daerah. Data perubahan tersebut juga tercantum dalam rilis resmi Pemprov Banten.

Perubahan KUA dan PPAS 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPd Tahun 2026. Tema pembangunan tetap mengacu pada Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan.

● (dam/hmi)

AMBB Soroti Dugaan Lemahnya Pengawasan Revitalisasi SMAN 14



PANDEGLANG |
Harian Merdeka

Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di SMA Negeri 14 Pandeglang mendapat sorotan Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB). Sorotan tersebut berkaitan dengan pengawasan pembangunan serta informasi mengenai sejumlah komponen dalam Rencana

Anggaran Biaya (RAB) diduga belum direalisasikan di lapangan.

Program revitalisasi tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,562 miliar untuk pembangunan enam ruang kelas. Pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan penyaluran anggaran langsung melalui rekening sekolah serta proses pengusulan dan monitoring yang terintegrasi secara digital.

Dalam mekanisme tersebut, pembangunan diduga tidak menggunakan perusahaan berbentuk CV atau PT sebagai pelaksana utama, melainkan melibatkan mekanisme swakelola dan masyarakat di sekitar sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah komponen yang diduga belum dialokasikan dalam pelaksanaan

pekerjaan, antara lain pembelian K3, pembuatan kotak adukan, serta mobilisasi peralatan dan material.

Kepala SMA Negeri 14 Pandeglang, Abdullah, saat dikonfirmasi di lokasi pembangunan mengatakan pelaksanaan program revitalisasi melibatkan P2SP atau Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Ia juga menyebut terdapat konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.

“Untuk anggaran pembiayaan kita alokasikan sesuai dalam RAB dan bahan materialnya sesuai dalam RAB,” ujar Abdullah, dikutip Wartawan, Minggu (20/9/2026).

Terkait konsultan pengawas yang tidak berada setiap hari di lokasi pekerjaan, Abdullah meminta hal tersebut dikonfirmasi

langsung kepada konsultan yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, sebelum program revitalisasi dimulai, sejumlah pengusaha sempat datang ke sekolah dan menawarkan untuk memborong pekerjaan. Namun, tawaran tersebut disebut ditolak oleh pihak sekolah.

Sementara itu, Gusti selaku konsultan pengawas pembangunan SMA Negeri 14 Pandeglang mengakui dirinya tidak dapat hadir setiap hari di lokasi pekerjaan.

Menurut Gusti, kondisi tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak sekolah karena dirinya juga memiliki pekerjaan pengawasan di lokasi lain.

“Walaupun saya tidak hadir tiap hari atau seminggu dua kali, sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah,” ujarnya.

● (ian/dam/hmi)

KOMISI II DPR

“Jadi pastinya ada ruang batas koalisi agar peserta tidak hanya 2 calon saja,” tambah dia.

Hanya saja, apakah nanti usulan dukungan minimal fraksi akan bertambah atau tidak, Dede mengatakan tergantung pembahasan di Panja RUU Pemilu. Komisi II saat ini sudah mulai menyusun Panja.

“Soal berapa banyak nanti dalam pembahasan panja,” ucap dia. Politikus Demokrat ini menuturkan, terkait kapan RUU Pemilu akan dibahas, Komisi II menargetkan sudah dimulai sebelum reses pada 9 Oktober.

Ia memastikan RUU Pemilu jadi prioritas.

“Insyaallah, sebelum reses kita mulai. Ya itu salah satu prioritas,” kata Dede.

Paloh Ungkap Usulan Dukungan 2 Fraksi

Sebelumnya, Paloh mengatakan, dirinya mendengar masukan agar calon presiden minimal mendapat dukungan dari dua fraksi di DPR.

“Saya mendengar ada masukan yang jelas bahwasanya pergantiannya model daripada dukungan pada presiden itu adalah berdasarkan dukungan

sedikit-dikitnya dua fraksi,” kata Surya Paloh.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh siapa yang mengusulkan model tersebut. Menurutnya, usulan tersebut baik. Ia menilai dukungan minimal dari dua fraksi pada dasarnya tetap membutuhkan dukungan suara tinggi, terlebih jika parliamentary threshold juga dinaikkan.

Komisi II Bentuk Panja

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya akan segera memben-

tuk Panja RUU Pemilu dalam 1-2 pekan ke depan.

Panja nantinya membahas berbagai materi revisi UU Pemilu yang menjadi salah satu hasil pembahasan para ketua umum partai politik dalam pertemuan sebelumnya.

Rifqi mengatakan, pembentukan Panja menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR. Panja akan menjadi ruang untuk membahas berbagai materi yang nantinya akan dituangkan dalam UU Pemilu yang baru.

● (Egi)

14 PEJABAT

Dari 14 pejabat yang dilantik, empat di antaranya dipercaya menempati posisi pejabat Eselon II di lingkungan DJP. Selain itu, dua pejabat ditunjuk untuk mengisi posisi Sekretaris dan Wakil Sekretaris pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian pengisian dan penyempurnaan jabatan di lingkungan Kemenkeu. Kementerian Keuangan menyebut pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses

penunjukan pejabat yang telah dilakukan sebelumnya.

Bukan Sekadar Pengisian Jabatan

Dalam sambutannya, Suahasil menegaskan bahwa pelantikan pejabat tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan formal untuk mengisi posisi yang kosong. Menurutnya, proses mutasi dan promosi memiliki arti strategis bagi keberlanjutan organisasi.

“Pada hari ini ada yang promosi, ada yang mutasi. Jadi ini adalah bentuk dari kompre-

hensifnya pemahaman kita terhadap pelantikan hari ini. Ini adalah upaya berkelanjutan agar organisasi kita terus bergerak dan berkembang dan mampu menjawab tantangan yang kita hadapi,” kata Suahasil.

Ia menjelaskan, perpindahan maupun promosi pejabat merupakan bagian dari upaya menjaga agar organisasi Kemenkeu terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang dihadapi. Suahasil juga meluruskan status pejabat

yang sebelumnya telah mengikuti proses pelantikan. Ia memastikan bahwa pejabat yang telah dilantik sebelumnya tetap sah menjalankan tugas dan jabatannya.

“Jadi yang sudah dilantik sebelumnya itu resmi, sah menjalankan tugas dan jabatannya masing-masing. Pelantikan hari ini merupakan kelanjutan penyempurnaan dari penunjukan yang lalu,” ujar Suahasil.

● (sim/hmi)

AKTIVIS GERUDUK

Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin 21 September 2026.

Dalam orasinya di atas mobil komando, orator aksi meminta lembaga antirasuah untuk mengusut asal-usul serta aliran dana secara transparan dan menyeluruh.

“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Nusron Wahid terkait perkara dugaan suap dan temuan uang sekitar Rp106,3 miliar,” ujar sang orator saat berorasi di atas mobil komando. Orator menyebut KPK sebelumnya telah menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam perkara dugaan suap pen-gurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Menurutnya, KPK juga telah menyatakan adanya informasi mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan kegiatan

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi bagian dari materi yang sedang didalami penyidik.

“Kami mendesak KPK menelusuri secara menyeluruh, kepemilikan, peruntukan, dan aliran uang yang disita dalam perkara tersebut. KPK harus menguji secara hukum setiap informasi mengenai dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 NU, berdasarkan bukti dan keterangan yang sah,” tegas sang orator.

Orator menegaskan, desakan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Kami menegaskan, tuntutan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid bukan berarti menghakimi atau menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putu-

san hukum yang berkekuatan tetap. Justru pemeriksaan diperlukan agar seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen, komunikasi, serta aliran dana dapat diuji berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum,” terangnya.

Dia juga meminta KPK memastikan setiap informasi mengenai aliran dana dalam perkara tersebut diuji berdasarkan bukti hukum.

“KPK jangan tebang pilih. Kami meminta KPK bekerja secara profesional dan independen,” tegasnya.

Orator menambahkan, apabila terdapat informasi, kesaksian, dokumen, ataupun bukti elektronik yang mengarah kepada keterlibatan pihak tertentu, termasuk Nusron Wahid, seluruhnya harus diperiksa secara proporsional sesuai hukum.

“Jika terdapat informasi, kesaksian, dokumen, ataupun bukti

elektronik yang mengarah kepada keterlibatan pihak tertentu, termasuk Nusron Wahid, maka seluruhnya harus diperiksa secara proporsional sesuai hukum. Tidak boleh ada seseorang yang berada di luar jangkauan pemeriksaan hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedudukan politik,” pungkasnya.

Adapun dalam perkara OTT ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan tersangka, yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti sekitar Rp106,3 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing. KPK juga masih mendalami aliran uang serta keterkaitan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. ● (Egi)

Messi Gagal Menangkan Inter Miami

MIAMI |
Harian Merdeka

Untuk keempat kalinya berturut-turut meraih hasil imbang dalam lanjutan . Menjamu , Inter Miami harus puas dengan skor akhir 2-2.

Pada pertandingan di Nu Stadium pada Senin (21/9/2026) pagi WIB, gol-gol Inter Miami diciptakan dan . San Diego mengejutkan setelah menciptakan gol cepat di 12 menit pertama lewat Anders Dreyer.

Jeppe Tverskov melepaskan umpan terobosan ke depan, yang membebaskan

kan Dreyer. Dalam situasi satu lawan-satu, Dreyer mengecoh kiper Dayne St. Clair untuk menceploskan bola ke sudut bawah gawang.

Inter Miami merespons pada 11 menit berselang. Lionel Messi

menciptakan gol balasan tim tuan rumah dari set-piece untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Inter Miami mendapatkan tendangan bebas di sisi kanan area D. Messi melepaskan tembakan melengkung, bola mengenai tanah lebih dulu sebelum bersarang di gawang San Diego.

Usai turun minum, San Diego membobol gawang Inter Miami lewat Marcus Ingvarsten.

Namun, gol itu dianulir setelah ditinjau VAR.

Inter Miami akhirnya berbalik unggul. Di menit ke-75, Luis Suarez menciptakan gol kedua sehingga mengubah skor jadi 2-1.

Serbuan dari sisi kanan diakhiri Messi dengan umpan terobosan ke dalam kotak penalti. Suarez meloloskan diri dari penjagaan pengawalannya, sebelum melesakkan sepakan kaki kanan yang melewati atas kepala kiper CJ dos

Santos.

Dreyer lagi-lagi jadi momok bagi Inter Miami. Pada 10 menit terakhir waktu normal permainan, Dreyer melahirkan gol keduanya di pertandingan ini yang sekaligus memaksakan laga berakhir 2-2.

Dreyer menerima umpan lambung matang, dan menyelinap dari tiga bek Inter Miami. Dari belakang titik putih, Dreyer melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut bawah gawang.

Dengan demikian, Inter Miami berarti melanjutkan tren hasil serinya usai berimbang dengan Nashville SC 2-2, Chicago Fire 1-1, dan Atlanta United 2-2. Skuad pink kini menempati posisi tiga klasemen Wilayah Timur dengan perolehan 46 poin, tertinggal 11 poin dari Nashville SC di puncak.

● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**